



Diterbitkan oleh Institute for Global Justice (IGJ)
Jl. Diponegoro No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-31931153, Fax. 021-3913956
igj@globaljust.org, www.globaljust.org
Pemimpin Redaksi: Bonnie Setiawan
Redaktur Pelaksana: Lutfiyah Hanim
Anggota Redaksi: Nur Hidayat, Amalia Pulungan

KETUA GC CASTILLO CONDONG PADA KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA MAJU

Ketua *General Council* (GC) Carloz Perez de Castillo mengumumkan hasil pertemuan informal HOD (*Heads of Delegation* / Ketua-ketua delegasi) pada tanggal 18 November lalu yang merupakan putaran pertama konsultasi setelah Cancun. Menurutnya ada empat isu kunci, yaitu pertanian, NAMA (*non-agriculture market access*), kapas dan isu-isu Singapura. Akan tetapi Dubes India MK Chandrasekhar menyatakan bahwa masih ada masalah yang memerlukan kejelasan dalam isu-isu Singapura. Juga Mauritius atas nama kelompok Afrika mengingatkan bahwa selain empat isu di atas, juga ada dua isu kunci bagi negara-negara berkembang, yaitu isu implementasi dan isu SDT (*special and differential treatment*).

Dari pertemuan HOD ini nampak posisi ketua GC, Castillo yang condong ke posisi AS dan UE. Ini nampak dari persepsi Castillo atas isu-isu kunci berikut ini:

1. Pertanian: Castillo menyatakan adanya penerimaan yang luas untuk mengerjakan *framework* bagi modalitas. Juga ia nyatakan adanya "elemen dan fitur positif

yang muncul di Cancun yang tercermin dalam Teks Derbez". Hal ini berlawanan dengan kenyataan sebenarnya bahwa Teks Derbez banyak mencerminkan kepentingan *joint text*-nya AS dan UE. Demikian pula *framework* yang ada berisikan formula penghapusan tarif yang sangat ambisius.

2. NAMA: Castillo merujuk pada Rev. 2 (yaitu teks Derbez) tentang NAMA atau tarif industri yang dikatakannya sebagai "meskipun teks ini nampaknya tidak disetujui seluruh delegasi, saya percaya bahwa ada pengenalan yang luas dari para anggota bahwa struktur dan elemen-elemen kuncinya ... tetap perlu dipertahankan". Perlu diketahui bahwa Rev. 2 ini adalah teks yang diinginkan oleh AS dan UE. Isinya ada dua. Pertama, soal formula penurunan tarif non-linear, dimana tarif tinggi perlu dikurangi dalam jumlah besar. Kedua, pendekatan sektoral yaitu penghapusan tarif oleh seluruh anggota atas sektor-sektor kunci, seperti tekstil, alas kaki, dan *apparel*. Dua hal ini mengarah kepada liberalisasi tarif besar-besaran yang sangat merugikan negara-negara berkembang.

3. Isu-isu Singapura: Castillo nampaknya hendak memaksakan isu-isu Singapura disetujui dengan formula 2+2 sebagai hasil kompromi. Ini berarti menyetujui 'fasilitasi perdagangan' dan 'transparansi belanja pemerintah', dan menaruh 'investasi' dan 'kebijakan kompetisi' dalam *working group* kembali. Sementara itu di dalam *working group*, ada kemungkinan untuk membahasnya sebagai "opt-in/opt-out", atau sebagai "plurilateral", atau bahkan sebagai "modalitas bagi negosiasi mendatang". Dengan demikian Castillo tidak menganggap sama sekali keberatan negara-negara berkembang tentang Singapore-issues di Cancun.

4. Kapas: Castillo condong untuk menempatkan isu kapas sebagai bagian dari perundingan pertanian, sebagaimana juga keinginan AS sebelumnya. Ini bertentangan dengan keinginan negara-negara Afrika yang meminta isu kapas dibahas khusus, karena sifatnya yang darurat dan kritis bagi perekonomian Afrika, bila subsidi kapas terus berlanjut di AS. Sebagaimana diketahui AS mensubsidi kapas sebesar \$ 3,6 milyar setahunnya

yang menyebabkan harga kapas Afrika jatuh.

Putaran kedua konsultasi informal HOD akan diadakan kembali sekitar tanggal 5 Desember mendatang. Putaran pertama ini oleh ketua GC, Castillo, dianggap sebagai "berguna", dan ia optimis bahwa akan dicapai resume dan kesimpulan yang sesuai dengan deadline Doha bagi pertemuan Pejabat Senior tanggal 15 Desember mendatang. Akan tetapi optimisme ketua GC nampaknya tidak disetujui banyak anggota lain. Ketua negosiator Argentina, Alfredo Chiaradia, menunjuk pada diamnya negara-negara besar: AS, UE dan Jepang. Negara-negara ini dalam perundingan tidak bicara sama sekali. Ini mungkin sekali karena semakin dalam perbedaan antara negara-negara besar tersebut dengan kelompok-kelompok baru negara berkembang, yaitu G-20 dan kelompok Afrika. KM Chandrasekhar menyatakan bahwa G-20 dan kelompok Afrika akan semakin dekat untuk bekerjasama, khususnya dalam perundingan pertanian.

Dalam pertemuan informal HOD tersebut, India mengangkat isu ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan, ketidakjelasan dalam hal NAMA dan *Singapore issues*, dan perlunya menempatkan kembali isu pembangunan sebagai pusat pembahasan dalam program kerja. Indonesia mengangkat isu tentang perundingan NAMA, khususnya tentang formula non-linear dan pendekatan sektoral. Juga mengangkat isu proses, di mana konsultasi seharusnya bersifat inklusif, dan tidak sekedar transparan. Benin yang mewakili negara-negara Afrika Barat menegaskan posisi Afrika untuk meminta isu kapas di bahas di luar perundingan pertanian. Cuba mendukung posisi ini.

Nampaknya performa Castillo sebagai ketua GC mengecewakan banyak orang, karena dia lebih dekat dengan kepentingan AS dan UE. Ini mengherankan karena sebelumnya dia bekerja di UNCTAD dan cukup vokal dalam membela posisi negara-negara berkembang. Masa kerja Castillo sebagai ketua GC akan habis pada Februari 2004, dan ia akan kembali ke

negaranya, Uruguay, dan akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. (BS)

Sumber: Kanaga Raja, "Trade: General Council Chair to intensify consultations on key issues", SUNS No. 5466, 20 November 2003; Aileen Kwa, "Developing Countries pushed to show more 'flexibility' in negotiations", Focus on the Global South - Geneva, 20 November 2003.

PERUNDINGAN PERTANIAN MASIH MENTOK, G-20 SEMAKIN MEMIMPIN

Ketua *General Council*, Carlos Perez de Castillo, telah mengadakan konsultasi "Green Room" dengan sekitar 30 negara pada tanggal 20-21 November 2003, di tengah pesimisme akan kelanjutan perundingan pertanian sampai akhir tahun ini. Dan hasil konsultasi itu membuat Castillo kembali kecewa. Menurutnya, pertemuan itu tidak menunjukkan adanya "konvergensi" di setiap posisi dan tidak adanya dasar yang sama. "Bahkan saya tidak mendapat basis bagi perbaikan paper". Di lain pihak konsultasi model Green Room ini juga mengecewakan banyak pihak yang tidak diundang. Kata seorang negosator Karibia, "Sejak selesainya Cancun, kita tidak dilibatkan dalam berbagai proses konsultasi. Proses ini haruslah inklusif. Kalau tidak, bagaimana kita bisa yakin bahwa kepentingan kita akan dibicarakan?".

Dalam konsultasi itu, para anggota tetap memajukan posisinya masing-masing sebagaimana di Cancun. Misalnya kelompok G-20 tetap mengajukan versi perbaikan atas teks Derbez 13 September. Ini adalah versi yang sudah dipersiapkan sejak di Cancun, tapi baru diajukan secara resmi sekarang. G-20 meminta pengurangan atas *Amber Box* (dukungan yang mendistorsi perdagangan) atas basis produk yang spesifik "akan tetap dirundingkan". Sementara untuk *Blue Box* harus segera diakhiri dan *Green Box* agar tetap "diperkuat". G-20 juga meminta agar *Tariff Rate Quotas* "diperluas". Juga agar dihapus SSG (*special safeguard*) yang banyak berlaku di negara-negara maju. Menurut India, teks Derbez hanya akan memotong tarif sebesar 30% bagi negara

maju, tetapi akan memotong tarif sebesar 30-70% bagi negara berkembang.

Di lain pihak, negara maju menginginkan teks Derbez dipakai sebagai basis perundingan. Teks Derbez menggunakan pendekatan campuran (*blended approach*) dalam hal pengurangan tarif melalui tiga kategori yang berbeda, yaitu pengurangan rata-rata, pengurangan berdasar formula Swiss, dan pengurangan hingga nol persen. Selain itu Uni-Eropa menuntut agar *Peace Clause* (pengecualian atas subsidi pertanian untuk dibawa ke *dispute settlement*) diperpanjang kembali setelah *deadline* tanggal 31 Desember 2004. Hal ini banyak ditentang negara berkembang. Sementara AS tetap bersikeras mengajukan formula yang seragam atas pengurangan tarif bagi semua negara, tapi bisa memberikan S&D ke negara berkembang dalam bentuk pengurangan yang lebih rendah.

Sementara itu Aliansi SP/SSM (*Strategic Product/Special Safeguard Measures*) menuntut agar ada proteksi atas tarif dari beberapa produk atas dasar *food security* dan *rural livelihood*. Negara maju nampaknya mau menerima konsep SP asalkan dengan bentuk yang berbeda dan tetap ada pengurangan tarif. Hal ini selalu ditolak oleh aliansi ini.

Pada akhirnya Castillo hanya bisa berkata, "tidak ada keinginan untuk berunding. Tetap ada kesulitan dalam isu-isu besar. Positifnya hanya bahwa diskusi tetap berjalan. Tapi tidak ada basis bagi teks baru dalam tahap sekarang".

Sementara itu sebuah pertemuan sebelumnya di Kairo yang dihadiri oleh 12 Menteri Perdagangan Afrika dan juga dihadiri Dirjen WTO Supachai, mengeluarkan sebuah deklarasi agar negara-negara besar perdagangan bisa kembali berunding. Dalam isu pertanian, deklarasi itu menyatakan, "Pertanian, dalam pandangan kami, tetap merupakan isu utama akses pasar bagi Afrika. Dalam konteks ini kami juga mendiskusikan proposal dari G-20 ... kami yakin bahwa antara kami dengan G-20 mempunyai banyak persamaan posisi, dan G-20 dapat secara efektif mengadvokasikan masalah-masalah pertanian Afrika". Selanjutnya

dalam isu kapas dinyatakan, "Para menteri juga bersepakat bahwa usulan kapas adalah signifikan secara sosio-ekonomi bagi Afrika ... sehingga perlu diperlakukan secara realistis dengan penekanan pada kemauan seluruh anggota untuk mencari solusi yang mengedepankan kepentingan negara-negara Afrika".

Menarik juga melihat posisi *Cairns Group* sekarang. Nampaknya Australia sebagai pemimpin kelompok Cairns merasa kehilangan kepemimpinannya, karena adanya G-20 dan pemimpin-pemimpin intinya (forum G-3 yaitu Brazil, India dan Afrika Selatan). Australia kini mencoba untuk merekrut anggota-anggota baru seperti Kolombia, Peru dan lainnya ke dalam *Cairns group*. Australia juga mempercepat pertemuan kelompok Cairns tahun depan (2004) dari semula September menjadi Februari. Kata Mark Vaille, Menperdag Australia, "Cancun memang mengecewakan, tapi kita bisa memulihkannya. Ini memerlukan komitmen dan kepemimpinan nyata, terutama dari negara-negara ekonomi kuat seperti Jepang, Uni-Eropa dan AS, dan juga Australia sebagai pemimpin *Cairns Group* ... ada kemungkinan menambah anggota baru (bagi *Cairns Group*)". (BS)

Sumber: *Bridges Weekly Trade News Digest Vol. 7, No. 40, 26 November 2003*; Aileen Kwa, "WTO Agriculture Negotiations: 'Derbez Text' increase trade distortions, more special treatment for US and EU!, Focus on the Global South - Geneva, 29 November 2003"; Chakravarti Raghavan, "Trade: Consultations on resuming Doha talks to go into New Year", *SUNS No. 5465, 19 November 2003*; Goh Chien Yen, "Trade: No convergence of views in WTO agriculture consultations", *SUNS No. 5468, 24 November 2003*.

PARA PEMIMPIN AMERIKA LATIN MENGINGATKAN BAHAYA PAKTA PERDAGANGAN

"Diskusi-diskusi perdagangan bebas di Miami minggu ini harus membahas kepedulian-kepedulian yang muncul dari negara-negara Amerika Latin yang harus mengurangi hambatan-hambatan perdagangannya, yang akan merugikan kaum miskin", kata beberapa presiden di

kawasan ini dalam suatu pertemuan tingkat tinggi di Bolivia.

Presiden Guatemala Alfonso Portillo, seperti halnya pemimpin negara-negara lain dalam pertemuan puncak Ibero-Amerika minggu ini, mengatakan bahwa keputusan negaranya untuk membuka lebih banyak impor gandum, terigu, ayam, pupuk, dan semen akan memperendah harga-harga barang-barang tersebut dan memaksa perusahaan-perusahaan lokal untuk menjadi lebih kompetitif. "Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap produk-produk tersebut, sekarang memilikinya", Portillo mengatakan kepada *The Herald*. "Tetapi kebanyakan orang sangat cemas. Mereka ingin hasilnya sekarang juga".

Sementara itu dengan gayanya yang khas, Presiden Venezuela Hugo Chavez berbicara lebih keras dari yang lain dengan mengatakan kepada para reporter, "perdagangan bebas yang tidak terkendalikan akan merusak rakyat kami".

Beberapa rekannya dari negara lain, yang berbicara lebih diplomatis, mengatakan dalam berbagai wawancara bahwa banyak rakyat di negaranya yang tetap ragu bahwa perdagangan bebas akan memperbaiki hidup mereka.

"Jelasnya, ada banyak kekhawatiran", kata Presiden Ekuador Lucio Gutierrez. "Sangat sulit untuk bersaing dengan negara-negara dengan teknologi yang maju dan subsidi-subsidi pertanian. Dalam banyak hal, kami tidak bisa bersaing".

Banyak negara-negara Amerika Latin mengeluh bahwa subsidi-subsidi AS terhadap petani-petani mereka memberikan keunggulan yang tidak *fair* ketika mengekspornya ke Amerika Latin.

Ketidaksepakatan mengenai hal-hal tersebut dan juga hal lainnya telah mengagalkan perundingan-perundingan WTO di Cancun pada September lalu ketika Brazil dan 20 negara berkembang lain menyerukan pemerintahan Bush untuk mengurangi keunggulan-keunggulan yang dinikmati oleh petani-petani Amerika.

Para pemimpin yang menghadiri Pertemuan Puncak Tahunan Ibero-Amerika mendengar kepedulian-kepedulian tersebut secara langsung tentang perjanjian perdagangan bebas ketika seorang pembicara dari apa yang disebut "pertemuan puncak alternatif" yang terjadi di Santa Cruz dibolehkan untuk membacakan daftar keluhan mereka pada Jum'at malam.

"Dengarkan rakyat Amerika", kata Eduardo Medina, salah seorang pemimpin Indian. "Hentikan segera negosiasi-negosiasi perjanjian perdagangan bebas". (NH)

Ratusan Aktivistis Berdemonstrasi dalam Acara FTAA

Ratusan aktivis anti-globalisasi dihalau dari tempat demonstrasi mereka pada hari Minggu 16 November 2003 ketika para 24 utusan *Western Hemisphere* (Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Karibia minus Kuba) memulai pembicaraan untuk membuka blok perdagangan terbesar dunia.

Para pembantu menteri-menteri perdagangan mulai mempersiapkan jadwal-jadwal pertemuan yang akan dimulai pada Kamis, ketika pimpinan mereka akan mencoba membuat kerangka kerja pembuatan *Free Trade Area of America* (FTAA). Sementara itu forum bisnis akan dimulai pada hari Senin.

Di bawah pengawasan polisi, sekitar 100 demonstran berkumpul di sebuah bengkel dekat pusat kota Miami, membuat boneka-boneka, karya seni, sistem air daur ulang dan pekerjaan-pekerjaan lain agar pesan anti-globalisasinya sampai.

Rosalia Nolasco dari barat daya Florida, kota pertanian Immokalee, berjalan bersama dengan anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun memprotes gaji rendah yang diterima oleh buruh-buruh tani.

"Mereka yang memungut tomat, cabe, juga sayur-sayuran, gajinya begitu rendah", kata Nolasco. "Saya di sini sepanjang minggu sebab saya percaya (terhadap protes ini)".

Sumber: : <http://www.tradeobservatory.org/News/index.cfm?ID=4971>

**CIVIL SOCIETY STATEMENT FOR
UNCTAD XI PREPARATORY
COMMITTEE MEETING
OF 17 TO 20 NOVEMBER 2003**

Statement by: Institute on Agriculture Trade and Policy, CONGO, World Council of Churches, Third World Network, OXFAM International, CONGAF, International Confederation of Trade Unions, Coordination SUD (South Coordination), KULU – Women and Development Denmark, International Coalition for Development Action, WWF International –World Wide Fund for Nature, Public Services International, International Gender and Trade Network and others.

Several civil society organizations (including the above) participated at a meeting convened by THE UNCTAD Secretariat on the 15th and 16th Oct to discuss and identify key issues which the current preparatory process and the subsequent Conference itself should take into account.

In our opinion, UNCTAD XI could be an important forum for tackling the most pressing developmental challenges confronting developing countries. Indeed, UNCTAD has taken the lead in doing so, addressing these issues through its own activities and analyses. Just last week, it held the 4th Inter-regional Debt Management Conference where solutions to the intractable problem of developing countries' debt were explored and examined.

UNCTAD's analyses contained in the annual Trade and Development Report, the Least Developed Countries report and the Economic Development in Africa Report and other similar documents, have seized upon the burning issues of economic development confronting developing countries. In particular, the TDR 2000 has pointed out the fundamental flaws and weaknesses in the international financial architecture, and last year's TDR has highlighted the imbalances and deficiencies of the multilateral trading system. Significantly, this year's issue of the TDR provides a sobering critique and account of the failure of neo-liberal policies in delivering economic growth and development. The African report is one of the few if not the only publication which critically assesses the limits and purported benefits of the World Bank and the IMF's Poverty Reduction Strategy Papers initiative. The UNCTAD annual debt report to the General Assembly offers an integrated assessment of the question of debt and its place in the efforts of developing countries to accumulate resources for their development.

The ultimate significance of these analyses and reports is that they enable developing countries to

think through the interface between their own national development policies and the global economic environment. This is valuable to all stakeholders in developing countries as they struggle to define an appropriate developmental strategy and their relationship with the global system. We hope that UNCTAD and the upcoming Conference will continue to fulfill this vital function.

This approach of finding the right development strategy that takes into fullest consideration the particular economic, environmental and social needs and circumstances of each individual developing country stands in stark contrast to the one-size-fits all approach of market fundamentalism and liberalization. Regrettably, this neoliberal ideology has dictated the design of development strategies, ignoring the contradictions and iniquities in the global economic system which developing countries are routinely faced with.

It is thought that this neoliberal approach would usher in a period of sustained economic growth. Strategies for this purpose have required many developing countries to break with past policies and to pursue closer and faster integration into the world economy. However, the past two decades have been characterized by slow and erratic growth, increased instability, and rising income gaps between most developing countries and the industrial world and the unprecedented erosion of natural resource base. In real terms, millions of people especially those in the poorest countries continue to live in abject poverty and resource insecurity. For them, even the pragmatic objective of reaching the Millennium Development Goals by 2015 remains a distant and empty promise.

Nonetheless, the WTO, World Bank and the IMF dogmatically continue to pressurize developing countries to adopt policies promoting greater market fundamentalism, a minimal role for the state and further liberalization. Perhaps as explained in this year's UNCTAD Trade and Development Report, "fanaticism calls for a doubling of effort in the face of failure."

The UN and its agencies, such as UNCTAD operate under a different belief, one that sees public intervention and a proactive state as necessary to enable basic needs to be met and human rights fulfilled. UNCTAD in this regard has been one of the voices demanding the sober rethink on development strategies. Its analyses of the challenges and vulnerabilities facing developing countries have provided guidance to many NGOs, Southern national governments, trade unions and people's movement who have long witnessed, suffered and are therefore challenging these neo-liberal economic policies.

More importantly, these reports and analyses have provided not only policy options for governments but have offered a vision of equity to the international economic system and the relationship between developed and developing countries premised on North-South partnership and the right to development, instead of the principles of liberalization and laissez-faire.

This should be one of the cornerstone principles of UNCTAD XI.

UNCTAD XI must recognize that in today's increasingly interdependent world, developing countries are ever more vulnerable to disturbances emanating from the advanced industrial countries.

International trade has been an important channel in transmitting the slowdown in the industrial countries to developing countries. Furthermore, in many regions, slower growth in export volumes has been compounded by lower prices, particularly those of primary commodities. In addition, developed countries continue to distort international trade by dumping artificially cheap agricultural products maintained inter alia, through high export and domestic subsidies. More importantly, the rhetoric of free trade does not reflect the reality of widening trade deficits, the closing down of firms and farms leading to the loss of jobs and livelihoods, the degradation of the environment and the further marginalization of women and other vulnerable groups in many developing countries which have adopted trade liberalization policies.

These critical issues must be taken up and effectively addressed by UNCTAD XI, if trade is to become a genuine tool for sustainable development. UNCTAD's work in the area of trade has also provided an important counterpoint to the mainstream and uncritical view that greater liberalization would simply usher in economic growth.

Finance has been another channel of transmission of vulnerability. The expectation that looser financial and monetary policies in the industrial and developing countries would trigger capital flows to the latter, has not happened. Rather, developing countries have been and continue to suffer from financial instability and crises, which have ravaged their economies, plunged them into debt and pushed millions of people below the poverty line.

The perils of indiscriminate integration into the unstable global financial system for the promise of development financing have to be highlighted and addressed by UNCTAD XI.

It is crucial that UNCTAD is not diverted onto a path, which is uncritically accepting of globalisation. In this kind of scenario, UNCTAD would end up shepherding developing countries into globalisation, regardless of its negative ramifications.

UNCTAD's relevance to developing countries is therefore to be affirmed and enhanced by UNCTAD XI.

It is in the light of this (civil society) statement that we see our participation in UNCTAD XI and its preparatory process. Our role as potential partners cannot simply be pre-determined as merely "supporting the objectives and policies defined at the intergovernmental level" as envisaged in the preparatory document for UNCTAD XI. The nature, content and parameter of the partnership between civil society and UNCTAD XI can only be determined through dialogue and other participatory processes that allow civil society's views, values, concerns and analyses to be taken into effective consideration.

On a more practical note, UNCTAD should enhance its efforts in promoting UNCTAD XI and reaching out to more civil society organisations, especially those from developing countries. Several practical hurdles such as the issue of accreditation, financing for civil society participation and the lack of information and advance notice of the UNCTAD XI process have not yet been effectively addressed.

These logistical matters and the modalities of civil society participation should be dealt with immediately. A list of practical concerns and recommendations is appended to this statement.

To sum up, UNCTAD and the UNCTAD XI conference must actively address the need to:

- change the unfair rules and patterns of international trade in support of sustainable development
- ensure greater stability and transparency to the international financial architecture,
- find durable and sustainable solutions to the commodities and debt problems,

Institute fundamental reforms to the international economic governance structures, by strengthening and enhancing the role of the United Nations on the one hand and to reform the World Bank, the IMF and the WTO to put sustainable development at the core of their mandate.

